

**BAHASA ANGGODO DALAM FENOMENA BAHASA INDONESIA
LOKAL: SEBUAH KASUS SOSIOLINGUISTIK**
(*Anggodo's Language in the Phenomenon of Local Indonesian Languages:
a Sociolinguistic Case*)

Maryanto

Pusat Bahasa, Kementerian Pendidikan Nasional, Jakarta
Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta 13220,
Telepon (021) 4706487, 4896558 ext 127, Fax. (021) 4750407
Diterima: 6 Mei 2010; Disetujui: 9 Juli 2010

Abstract

This paper is answering a question of how to strengthen the power of Indonesian as the language of everlasting unity in Indonesia. The answer is the importance for political recognition of the diverse localities of the language. In this case study, a qualitative approach is employed to explain the sociolinguistic phenomenon of local Indonesian practices as the case of the language uttered in Anggodo's telephone calls which have recently been appeared in public by the Constitution Court. The nature of the data is secondary which are collected by the recordings of Anggodo's telephone calls. The purposive sampling method is used to extract the sample from all of Anggodo's utterances. The data analysis is in terms of hermeneutics to find out the sociolinguistic meanings of the overall ambiguous texts which are produced in the discourse of Anggodo's case. Such a language practiced by Anggodo in society is found to be linguistically ambiguous--whether it is Indonesian or local language--under the current language policy separating Indonesian from local languages.

Key words: *sociolinguistic, local language, language policy*

Abstrak

Artikel ini menjawab pertanyaan bagaimana meningkatkan kekuatan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan abadi di Indonesia. Jawaban atas pertanyaan itu ialah pentingnya pengakuan politis terhadap keberagaman lokalitas bahasa Indonesia. Dalam studi kasus ini, pendekatan kualitatif dimanfaatkan untuk menjelaskan fenomena praktik berbahasa Indonesia lokal, seperti kasus bahasa yang dituturkan Anggodo dalam percakapan telepon yang dimunculkan di publik baru-baru ini oleh Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang diambil dari rekaman pembicaraan telepon Anggodo. Metode sampling bertujuan (*purposive sampling*) digunakan untuk mengekstrak percontoh dari semua tuturan Anggodo. Data dianalisis menurut teori hermeneutika untuk menemukan makna sosiolinguistik atas keseluruhan ambiguitas teks yang telah diproduksi dalam diskursus kasus Anggodo. Bahasa seperti yang dipraktikkan Anggodo di masyarakat ditemukan sangat ambigu secara linguistik—apakah bahasanya merupakan bahasa Indonesia (bahasa nasional) atau bahasa lokal (daerah)—menurut kebijakan bahasa yang sekarang berlaku untuk memisahkan bahasa Indonesia dari bahasa lokal.

Kata kunci: sosiolinguistik, bahasa lokal, kebijakan bahasa

1. Pendahuluan

Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 36) telah menyatakan, "Bahasa negara ialah bahasa Indonesia." Pernyataan konstitusi itu ditafsirkan telah mendukung bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Sumpah Pemuda 1928 juga menyebutkan bahwa bahasa Indonesia merupakan "bahasa persatuan". Istilah *bahasa persatuan* itu diartikan sebagai ungkapan tekad bangsa Indonesia untuk bersatu dengan pilar bahasa Indonesia. Ungkapan tekad bangsa Indonesia tersebut didefinisikan lebih lanjut dalam kebijakan politik bahasa nasional. Secara politis, bahasa Indonesia sekarang diakui sebagai bahasa resmi dan bahasa nasional.

Di luar kemauan politik bahasa yang sekarang berlaku tersebut, telah tumbuh dan berkembang bahasa Indonesia yang maujud atau bentuk tuturannya bergerak melokal; mendekati dan--bahkan--menyerupai bahasa daerah/lokal. Fenomena bahasa Indonesia lokal ini belum memperoleh pengakuan politik. Kebijakan kebahasaan (*language policy*) tidak memberlakukan bahasa Indonesia sebagai bahasa lokal. Dalam kaitan itu, perlu disebutkan bahwa ada tiga wadah kebahasaan di Indonesia yang masing-masing dilabeli *bahasa Indonesia*, *bahasa daerah*, dan *bahasa asing*.

Tiga wadah bahasa--Indonesia, daerah, dan asing--ditempatkan terpisah secara politis dengan harapan tidak akan ada percampuran tuturan yang dalam konsep linguistik disebut sebagai bentuk *bahasa hibrida* ('*hybrid language*'). Harapan yang bernuansa politik tersebut tertuang dalam kebijakan bahasa yang dihasilkan dari Seminar Politik Bahasa Nasional pada tahun 1975. Seminar serupa yang digelar pada era Reformasi, tepatnya tahun 1999, menghasilkan resolusi yang tidak mengubah sikap politik terhadap keberadaan tiga keranjang bahasa tersebut.

Perubahan sikap politik yang amat menonjol dari kebijakan kebahasaan itu ialah bahwa masalah bahasa daerah menjadi urusan setiap pemerintah daerah (Hasan dan Sugono, 2000).

Dinamika politik kebahasaan tersebut telah berdampak sosial pada apa yang dalam makalah ini akan disebut sebagai kebangkitan primordialisme yang berdalih pelestarian *bahasa ibu*. Istilah *bahasa ibu* yang makin populer di Indonesia ini telah dikonsepsi atau dikonstruksi dengan mengacu hanya pada bahasa daerah; tanpa memasukkan di dalamnya konsep bahasa Indonesia. Dalam konteks politik yang berlaku sekarang, bahasa Indonesia tidak akan pernah berkedudukan sebagai bahasa ibu. Konsep bahasa Indonesia yang terpisah sepenuhnya dari bahasa daerah tersebut menimbulkan permasalahan yang sangat menarik untuk ditelaah dari aspek sosial dan linguistik (sosiolinguistik).

Makalah ini mengangkat persoalan kerancuan atau ambiguitas bentuk bahasa yang ditinjau dari kebijakan politik yang sekarang berlaku memisahkan konsep bahasa Indonesia dari bahasa daerah. Persoalan ini diangkat dari kasus Anggodo Widjojo yang tuturannya (dalam pembicaraan lewat telepon) baru-baru ini disadap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan diperdengarkan kepada publik di Mahkamah Konstitusi (MK). Berikut adalah percontoh bentuk bahasa tuturan Anggodo (dengan kawan bicarannya) yang menjadi bahan kajian dalam makalah ini.

Halo. [...] Krungu nggak? [...] Suaramu jelas kok aku. [...] Kalo kita pasti nggak salah dong? [...] Wis ngerti; engko tak kirim kronologis sore iki; wocoen terus sesuk istirahat sek yo? [...] He-eh. Wis sinkron saiki? Opo masih Senen lagi? Wis ... (Maryanto, 2010).

Bentuk bahasa yang dituturkan Anggodo (bahasa Anggodo) merupakan fakta bahasa yang bertentangan dengan harapan akan adanya dikotomi antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Dari aspek linguistik, bahasa Anggodo sangat rancu untuk ditentukan masuk ke dalam keranjang bahasa Indonesia atau bahasa daerah (Jawa). Kerancuan bentuk bahasa seperti tuturan Anggodo tersebut diduga kuat telah menjadi gejala sosial di dalam masyarakat luas. Belum dipahami dan ditangani dengan baik. Konsekuensinya, gejala bahasa seperti itu telah berubah menjadi gejolak sosial yang membangkitkan primordialisme di hampir setiap daerah di Indonesia.

Banyak daerah--terutama unsur pemerintah daerah--sekarang cenderung membangkitkan primordialisme dengan mengobarkan semangat berbahasa ibu. Semangat primordialisme tersebut, misalnya, ditunjukkan di Jawa Tengah. Baru-baru ini, seorang kepala pemerintah daerah tidak bersedia diwawancarai dengan menggunakan bahasa Indonesia. Bahkan, telah berkembang aturan wajib berbahasa daerah sebagai bahasa resmi pemerintahan. Alasan adanya aturan wajib berbahasa daerah tersebut merupakan pelestarian bahasa ibu. Bahasa ibu atau bahasa daerah itu diharapkan tidak berbentuk rancu atau ambigu, seperti bentuk bahasa Anggodo.

Harapan akan adanya dikotomi politis antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah telah tidak seiring dengan kenyataan bahasa yang dituturkan di masyarakat Indonesia. Seperti bahasa Anggodo, bahasa masyarakat cenderung berbentuk rancu, jika dimasukkan ke dalam bentuk bahasa Indonesia atau bahasa daerah/lokal. Kesenjangan antara harapan dan kenyataan itu telah menimbulkan permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut.

- 1) Bagaimana deskripsi peristiwa bahasa Anggodo?
- 2) Bagaimana analisis fenomena bahasa Anggodo?
- 3) Bagaimana interpretasi makna teks Anggodo?

Alasan utama pengambilan fokus ini adalah bahwa fenomena berbahasa Indonesia lokal, seperti yang dipraktikkan Anggodo, merupakan gejala umum di masyarakat Indonesia. Jika tidak dijelaskan secara komprehensif, seperti sekarang, gejala itu akan selalu menimbulkan gejolak sosial yang berupa euforia primordialisme. Gejala bahasa itu dianggap sebagai ancaman kepunahan bahasa ibu. Oleh karena itu, sangatlah penting fenomena bahasa Indonesia lokal dijelaskan secara tuntas dari aspek sosiolinguistik.

Diskusi kasus bahasa Anggodo ini bertujuan menjelaskan secara komprehensif adanya fenomena bahasa Indonesia lokal, yaitu gejala penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa lokal (daerah) secara bersamaan dalam suatu peristiwa bahasa di masyarakat. Selain itu, diskusi ini juga bertujuan untuk memperlihatkan pentingnya harmonisasi hubungan antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Untuk itu, makalah ini bermaksud meninjau kembali kebijakan bahasa yang telah menciptakan dikotomi bahasa Indonesia dan bahasa daerah.

Diskusi ini sangat bermanfaat, terutama bagi para pengambil kebijakan bahasa, untuk memperoleh pemahaman komprehensif terhadap perkembangan bahasa Indonesia, pada satu sisi, dan bahasa daerah, pada sisi lain. Pemahaman ini bermanfaat penting untuk merumuskan perencanaan bahasa daerah, termasuk sebagai bahasa ibu untuk dunia pendidikan anak (lihat Mahsun, 2009). Selanjutnya, perencanaan pendidikan berbasis bahasa ibu, sebagaimana yang sekarang gencar

dituntut oleh dunia internasional (Pattanayak, 1981), direkomendasikan agar berbasis fakta adanya bahasa Indonesia lokal.

2. Kerangka Teori

Penelitian ini mengeksplorasi fenomena bahasa Anggodo sebagai kasus sosiolinguistik. Konsep sosiolinguistik ini dirujuk pada bidang kajian bahasa mengenai penggunaan bahasa dalam sebuah interaksi sosial, yaitu interaksi sosial yang dilakukan oleh Anggodo dalam percakapan teleponnya dengan seseorang yang telah disadap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Interaksi sosial antara Anggodo dan kawan bicaranya tersebut dikaji dengan menggunakan kerangka sosiolinguistik Dell Hymes (dalam Nababan (1993:7) yang disebut model S-P-E-A-K-I-N-G (*Setting, Participants, Ends, Act sequence, Key, Instrumentalities, Norms, Genre*).

Dalam makalah ini konsep sosiolinguistik tersebut juga dirujuk pada bidang kajian bahasa mengenai hubungan perilaku bahasa dan perilaku sosial. Perilaku sosial yang diangkat dalam makalah ini adalah interaksi Anggodo dengan kawan bicaranya dalam pembicaraan melalui telepon tersebut. Sementara itu, perilaku bahasa pada interaksi sosial itu memperlihatkan perilaku bahasa Indonesia dan bahasa daerah/ bahasa lokal yang tidak saling terpisahkan. Bahasa Indonesia dan bahasa daerah—yang terpisah secara politis—berperilaku membentuk persatuan atau percampuran bahasa yang dalam makalah ini disebut sebagai bentuk hibriditas bahasa Indonesia lokal.

3. Metode

Penelitian ini merupakan kegiatan studi pustaka (*library research*) yang bertujuan agar permasalahan bahasa

Indonesia lokal memperoleh jawaban komprehensif dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Untuk itu, penelitian ini memanfaatkan metode kualitatif dengan pendekatan antropologi. Penelitian ini menjangkau data deskriptif yang berupa rekaman (transkrip) tuturan bahasa yang diidentifikasi sebagai bentuk hibriditas antara bahasa Indonesia dan bahasa lokal, yaitu bahasa Indonesia lokal. Fenomena bahasa ini dieksplorasi untuk memperoleh pemahaman komprehensif dan mencari opsi solusi penanganan yang sistematis atas dampak sosial dari gejala bahasa ini.

Berdasarkan cakupan data, penelitian ini merupakan penelitian kasus untuk menelaah aspek sosiolinguistik atas fenomena bahasa Anggodo. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik *sampling* bertujuan (*purposive sampling*): untuk memperlihatkan fenomena bahasa Indonesia lokal. Selanjutnya, data tersebut dianalisis dengan menggunakan teknik hermeneutik untuk mencari pemahaman makna sosiolinguistik atas kerancuan bentuk teks yang diproduksi dalam wacana kasus bahasa Anggodo. Untuk itu, dalam analisis hermeneutik tersebut, bentuk bahasa Anggodo dibandingkan bentuk lain yang serupa untuk menjelaskan lebih lanjut adanya fenomena bahasa Indonesia lokal di masyarakat Indonesia.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Deskripsi Peristiwa Bahasa Anggodo

Nama Anggodo (lengkapannya: Anggodo Widjojo) secara mendadak terkenal di masyarakat. Namanya disebut-sebut oleh publik sejak Mahkamah Konstitusi pada awal November 2009 membuka rekaman pembicaraan Anggodo dengan sejumlah orang penting melalui telepon. Pembicaraan telepon tersebut sebelumnya disadap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pembicaraan Anggodo itu merupakan peristiwa bahasa

(*speech event*) yang dapat dideskripsikan dengan model S-P-E-A-K-I-N-G yang dikembangkan oleh sosiolinguis [Dell Hymes](#). Untuk mendeskripsikan peristiwa bahasa Anggodo, telah diambil sampel atau percontohan tuturan sebagai berikut.

Halo. [...] Krungu nggak? [...] Suaramu jelas kok aku. [...] Kalo kita pasti nggak salah dong? [...] Wis ngerti; engko tak kirim kronologis sore iki; wocoen terus sesuk istirahat sek yo? [...] He-eh. Wis sinkron saiki? Opo masih Senen lagi? Wis....

Dengan menggunakan model S-P-E-A-K-I-N-G, peristiwa bahasa Anggodo tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut. Dari segi *setting* (latar fisik pembicaraan), pembicaraan Anggodo berlangsung lewat telepon, tidak dalam pertemuan bersemuka. *Partisipan* peristiwa bahasa itu telah diidentifikasi bernama Anggodo dan pejabat-pejabat penting di Indonesia. Untuk komponen *end* yang diartikan Hymes sebagai tujuan dalam peristiwa bahasa, telah diketahui bahwa tujuan pembicaraan Anggodo itu adalah untuk bekerja sama menangani sesuatu perkara hukum.

Dalam hal *act sequence* (bentuk urutan peristiwa), pembicaraan Anggodo dimulai dengan sapaan *halo* dan diisi dengan tindakan penyelaan yang bersifat kolaboratif antarpembicara. Mengenai komponen *key* (*kunci tuturan*), terdapat bentuk nada tuturan bertanya jawab. Pembicaraan tampak sangat menonjol dengan intonasi pertanyaan untuk konfirmasi atas suatu hal. *Krungu nggak? Wis sinkron saiki? Opo masih Senen lagi?* Pembicara menuturkan banyak kalimat tanya seperti itu untuk menunjukkan permintaan persetujuan kerja sama.

Lebih lanjut, *instrumen* bahasa Anggodo dapat dideskripsikan sebagai alat bahasa informal dengan ciri khas bahasa daerah Jawa: bahasa Indonesia Jawa,

bukan bahasa Indonesia yang diberlakukan secara nasional (bahasa resmi nasional). Sementara itu, dari aspek *norma*, peristiwa bahasa Anggodo membangun hubungan interpersonal yang sangat akrab. Dalam peristiwa bahasa itu, para partisipan tampak bukan teman baru, tetapi sahabat yang telah lama bergaul akrab. Untuk komponen terakhir, yaitu *genre*, peristiwa bahasa Anggodo tersebut berisi pokok pembicaraan mengenai persoalan hukum yang sekarang masih berlanjut menjadi pokok pembicaraan publik.

4.2 Analisis Fenomena Bahasa Anggodo

Peristiwa bahasa Anggodo yang telah dideskripsikan tersebut merupakan fenomena alam bahasa pada umumnya. Fenomena ini tidak hanya terjadi pada bahasa Indonesia dan bahasa Jawa, sebagaimana peristiwa bahasa Anggodo. Akan tetapi, pada bahasa lain yang hidup lestari di dalam masyarakat penuturnya, fenomena serupa juga dialami, misalnya, bahasa Inggris. Seorang penutur bahasa Inggris pernah dicatat Micheal Erard (2008 dalam Maryanto, 2008) ketika berkata, “*I can’t speak Malaysian or Singaporean English very well, but I speak Chinese English better.*” Perkataan penutur bahasa Inggris itu menunjukkan keadaan bahasa Inggris yang sesungguhnya bergerak melokal.

Selain bergerak melokal di Malaysia, Singapura, dan Cina seperti yang ditunjukkan oleh Erard tersebut, bahasa Inggris juga bergerak mendekati bahasa lokal di India. Menurut sebuah analisis historis yang dilakukan oleh Batt, sepanjang era kolonialisasi, bahasa Inggris standar (*Standard British English*) merupakan sarana penanaman ideologi linguistik kolonialisme (Bhatt, 2005). Penanaman ideologi itu dilakukan melalui media pendidikan yang mulai dirancang dengan agenda *Minute on Indian Education* pada tahun 1835.

Di era pascakolonialisasi India, sebagaimana dinyatakan dalam analisis Batt tersebut, bahasa Inggris telah bereproduksi dari bahasa Inggris standar untuk membentuk bahasa lokal. Bahasa lokal tersebut terbentuk karena bahasa Inggris telah tersebar ke semua komponen bangsa India di tingkat lokal. Pertumbuhan bahasa ini menciptakan *apartheid linguistik bahasa Inggris (English-linguistic apartheid)* yang berkonotasi positif. Cita-cita pendidikan India "*Indian in blood and colour, but English in taste, in opinion, in morals and in intellect*" telah terwujud. Perwujudan cita-cita itu terlihat, misalnya, dari pengakuan atas keberadaan bahasa Inggris "Babu" dan "Butler" yang sebelumnya hanya memperoleh status *pijin*.

Dalam analisis sosiolinguistik ini, dapat dicatat bahwa bahasa Inggris telah bergerak melokal; berkembang menjadi bahasa lokal (setempat) di India, Cina, Malaysia, dan Singapura. Di tempat atau lokasi itu, status bahasa Inggris pun berkembang. Bahasa itu berkembang dari bentuk *pijin*, yaitu sekadar alat komunikasi atau interaksi sosial tanpa status sebagai bahasa ibu atau bahasa asli. Akhirnya, bahasa itu berubah menjadi *kreol*, yaitu bentuk bahasa tuturan yang diakui oleh masyarakat secara natural sebagai bahasa ibu atau bahasa asli: bahasa Inggris Singapura, Cina, dan sebutan serupa di lokasi lain.

Keadaan sosiolinguistik pada bahasa Inggris di banyak tempat tersebut dapat dibandingkan dengan bahasa Indonesia di berbagai daerah di Indonesia. Di daerah Jawa (khususnya Jawa Timur), sebagai contoh kasus, Anggodo telah memeragakan bahasa Indonesia yang bergerak melokal: menjadi satu rupa dengan bahasa (daerah) Jawa. Tidak hanya di Jawa, tetapi juga di Papua bahasa Indonesia telah lama bergerak membentuk

bahasa Indonesia lokal (Papua). Kelokalan bahasa Indonesia itu dapat dilihat dalam perbandingan antara contoh tuturan (A) yang diambil dari bahasa Papua dan contoh (B) dari bahasa Anggodo.

(A) *Dorang adalah Obed, Markus deng Pilemon. Lagi asik-asik ngebut, ehh tra tau dari mana itu polisi su kaseh stop dorang deng pele-pele dorang tiga pu motor.* (Widodo, 2006)

(B) *Halo. [...] Krungu nggak? [...] Suaramu jelas kok aku. [...] Kalo kita pasti nggak salah dong? [...] Wis ngerti; engko tak kirim kronologis sore iki; wocoen terus sesuk istirahat sek yo? [...] He-eh. Wis sinkron saiki? Opo masih Senen lagi? Wis....*

Terdapat kemiripan ciri sosiolinguistik pada tuturan bahasa Indonesia Papua pada contoh (A) dengan bahasa Indonesia Jawa pada contoh (B). Bahasa Indonesia secara natural tumbuh melokal; mendekati dan--bahkan--menyerupai bahasa lokal/bahasa daerah. Di daerah Jawa dan Papua itu, seperti kata Arcana (2008), "Naturalisasi' bahasa Indonesia telah menciptakan dan menempatkan bahasa Indonesia dalam posisi dan bentuk yang unik." Menurut Arcana, bahasa Indonesia telah berhasil menjadi wahana komunikasi dan perekatan bangsa baru yang bernama *Indonesia*. Pada saat yang sama, lanjut Arcana, bahasa itu "justru memasuki ranah etnisitas yang membuatnya 'luluh' dan bernuansa sangat lokal".

Dengan bergerak melokal, seperti pada contoh (A) dan (B), bahasa Indonesia telah bergabung atau bercampur dengan bahasa daerah dalam rangka meluluhkan diri secara natural menjadi bahasa ibu. Dalam hal bahasa ibu ini, bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang mengikuti 'kontur lokal' dan akhirnya melahirkan mozaik bahasa khas (daerah) Indonesia. Mozaik bahasa Indonesia ini diisi dengan berbagai bentuk leksikal dan

gramatikal bahasa daerah. Misalnya, di dalam bahasa Indonesia Papua, telah muncul idiom lokal seperti ungkapan *tra tau* ('tidak tahu') dan *su kaseh stop* ('telah menghentikan').

Di dalam bahasa Indonesia Jawa, Anggodo juga telah memunculkan bentuk-bentuk bahasa (khas kesukuan) Jawa. Dalam bahasa Anggodo itu, ternyata, bahasa kesukuan Jawa—baik aspek leksikal (misalnya, *krungu* 'dengar') maupun gramatikal (misalnya, *wocoen* 'bacalah')—telah berhimpun menjadi mozaik bahasa Indonesia. Dalam mozaik bahasa itu, telah terjadi hibriditas bahasa (*language hybridity*) seperti yang terjadi pada bahasa Inggris dengan bahasa setempat (lokal) di India, Malaysia, Cina, dan Singapura. Analisis sosiolinguistik ini telah membuktikan terjadinya mozaik bahasa Indonesia lokal, yaitu bahasa Indonesia yang berisi bahasa-bahasa daerah, antara lain, bahasa Papua dan bahasa Jawa.

Menurut kebijakan politik kebahasaan yang sekarang berlaku, bahasa Indonesia Jawa dan bahasa Indonesia lokal lainnya merupakan bentuk rancu atau ambigu karena bentuk bahasa itu tidak dapat dideskripsikan dengan jelas hanya sebagai bahasa Indonesia atau hanya sebagai bahasa daerah/lokal. Bentuk-bentuk bahasa rancu tersebut tidak akan bermakna tanpa perubahan sikap politik kebahasaan. Tanpa adanya perubahan kebijakan politik, kerancuan bahasa Indonesia berubah menjadi kekacauan di masyarakat dengan anggapan bahasa Indonesia dan bahasa daerah tengah mengalami kerusakan. Anggapan itu memicu munculnya perimordialsme yang berdalih pemertahanan bahasa daerah sebagai bahasa ibu.

4.3 Interpretasi Makna Teks Anggodo

Teks bahasa Anggodo yang telah dibandingkan dengan bahasa Indonesia

Papua dalam bagian di atas telah memunculkan interpretasi mengenai masalah hakikat bahasa Indonesia. Pada hakikatnya, secara politis, bahasa Indonesia diartikan hanya sebagai bahasa yang berbasis genetis keturunan rumpun Melayu, sebagaimana rumusan kebijakan kebahasaan yang berlaku sekarang (baca Keraf, 1991). Sementara itu, fakta bahasa Anggodo menunjukkan perkembangan bahasa Indonesia dengan berbasis ciri areal atau lokasi pertumbuhannya. Bahasa Indonesia telah tumbuh dan berkembang di luar daerah rumpun Melayu.

Menurut kebijakan politik kebahasaan, daerah penuturan bahasa Melayu tidak mencakupi daerah Jawa yang berbahasa berbahasa (daerah) Jawa. Akan tetapi, dengan adanya fakta bahasa Anggodo, pada saat ini telah muncul spekulasi bahwa bahasa Indonesia lebih berkembang dengan ciri lokasi/areal pertumbuhannya daripada dengan sifat genetis sebagai keturunan rumpun bahasa Melayu. Sesungguhnya, sejak awal pembentukannya sebagai bahasa kebangsaan Indonesia, bahasa ini telah dirancang dengan berbasis ciri lokasi Indonesia.

Sumpah Pemuda 1928 telah menyatakan bahwa bangsa yang bernama *Indonesia* itu menjunjung bahasa yang juga bernama *Indonesia*. Kata *Indonesia* itu merujuk baik pada nama bahasa bangsa Indonesia dan sekaligus pada nama lokasi tanah air yang juga disebut *Indonesia*. Rancangan yang sama juga terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 (pada Pasal 36), yang secara tegas menyatakan, "Bahasa negara ialah bahasa Indonesia". Rumusan Undang-Undang dan Sumpah Pemuda tersebut merupakan pernyataan tekad untuk membentuk negara bangsa yang dalam khazanah sosiolinguistik sering disebut sebagai negara endoglosik.

Dalam fakta sejarah Indonesia ada

semacam kemauan politik dari para pendiri negara bangsa Indonesia untuk merancang bahasa Indonesia berbasis ciri lokasi atau areal berdirinya negara bangsa Indonesia. Negara-negara eksoglosik, seperti Australia dan Brasil, telah memilih bahasa negaranya tanpa merujuk ciri lokasi negaranya, tetapi ciri negara lain, yaitu bahasa Inggris (di Australia) dan bahasa Portugis (di Brasil). Sebaliknya, Indonesia telah memilih bahasa Indonesia dengan merujuk lokasi/wilayah tanah air dan bangsa yang keduanya bernama Indonesia.

Mengingat wilayah negara bangsa Indonesia ini sangat beragam secara sosio-kultural, apa yang disebut dengan bahasa Indonesia itu pun mestinya dirancang dengan menampung fakta ketidakseragam praktik berbahasa Indonesia di tingkat lokal/daerah. Di setiap wilayah Indonesia, bahasa Indonesia memiliki bentuk tuturan yang berbeda, tetapi perbedaan bentuk bahasa lokal ini dapat disatukan dalam satu wadah mozaik bahasa Indonesia. Kenyataan ketakseragaman bahasa Indonesia tersebut telah sejalan dengan semboyan negara bangsa Indonesia "Bhineka Tunggal Ika". Dengan semboyan itu, bahasa Indonesia telah tumbuh dan berkembang mengikuti 'kontur lokal', seperti yang ditunjukkan dalam kasus Anggodo.

Ketika Anggodo bertanya kepada kawan bicaranya lewat telepon yang disadap KPK, sebagai contoh, ia bertanya dengan menggunakan instrumen bahasa berupa kalimat (1). Kalimat (1a—c) tidak digunakan oleh Anggodo dalam peristiwa bahasa itu mungkin karena alasannya untuk membentuk hubungan sosial yang lebih akrab dengan kawan bicaranya.

- (1) *Krungu nggak?*
- (1a) *Dengar, nggak?*
- (1b) *Mendengar, tidak?*
- (1c) *Apakah kamu [Anda] mendengar atau tidak?*

Keragaman bahasa Indonesia di tingkat lokal/daerah juga dapat ditemukan di daerah penuturan bahasa Sunda (Jawa Barat). Dalam sebuah majalah berbahasa Sunda, *Mangle*, telah ditemukan bentuk tuturan (2) yang disebut bahasa Indonesia Sunda.

- Bade nyoblos; bade golput?*
- (2a) *Mau nyoblos; mau golput?*
- (2b) *Mau mencoblos; mau golput?*
- (2c) *Maukah kamu [Anda] mencoblos atau menjadi golput?*

Kalimat (2) ditemukan telah dituturkan oleh seorang petugas pemungutan suara (Pemilu) dengan gaya lokalis di daerah penuturan bahasa Sunda. Tuturan kalimat itu juga membuktikan adanya percampuran bentuk bahasa daerah (Sunda) dan bahasa Indonesia (dalam bentuk informal). Kalimat (2) yang



berbentuk bahasa Indonesia lokal (hibriditas bahasa Indonesia dengan bahasa Sunda) itu bukanlah kalimat bahasa Indonesia yang dapat diterima sebagai bahasa Indonesia yang baik dan benar (baku) di ruang formal. Jika dilihat dari ciri formalitas bahasa, hanyalah kalimat (1c) dan (2c) yang akan dianggap paling berterima dan diikuti oleh kalimat (1b) dan (2b).

Sementara itu, kalimat (1a) dan (2a) akan ditolak dalam situasi pemakaian bahasa formal, tetapi dituturkan dalam situasi informal. Meskipun tidak dapat diterima dalam konteks formal (baku), kalimat (1) dan (1a) serta kalimat (2) dan (2a) akan hidup lestari di ruang informal. Dari contoh kalimat (1—1c) dan (2—2c), tampak sangat mudah untuk menarik 'benang merah' untuk menghubungkan bahasa nasional dengan bahasa lokal secara harmonis. Bentuk bahasa lokal akan mendapat tempat yang layak dalam wadah bahasa Indonesia.

Bentuk bahasa seperti pada kalimat (1) dan (2) dituturkan dengan derajat lokalitas yang amat tinggi. Oleh karena itu, bentuk bahasa seperti perlu didudukkan serta difungsikan sebagai bahasa Indonesia informal dalam bentuk bahasa Indonesia lokal, sedangkan kalimat (1c) dan (2c) difungsikan sebagai bahasa Indonesia formal baku atau rujukan nasional. Makin rendah derajat formalitas bentuk bahasa Indonesia, ternyata, makin tinggi derajat lokalitasnya. Demikian pula sebaliknya sehingga tidak perlu ada dua keranjang bahasa—Indonesia dan daerah—yang ditempatkan secara terpisah.

Sangat merugikan kebijakan politik bahasa yang telah memisahkan bahasa Indonesia dari bahasa lokal atau bahasa daerah. Secara politis, bahasa Indonesia berkembang atau dikembangkan hanya dengan berbasis genetik sebagai keturunan bahasa Melayu. Kebijakan politik bahasa itu telah melemahkan posisi bahasa Indonesia bagi bangsa Indonesia. Bangsa lain yang secara politis mengaku berbahasa Melayu, seperti di Malaysia, akan mudah mengklaim bahwa bahasa Indonesia adalah bagian dari bahasa bangsanya. Padahal, secara linguistik, bahasa Indonesia terbukti (seperti pada contoh kalimat (1—1c) dan (2—2c)) telah mengakar kuat juga di tingkat daerah/

lokal, selain di tingkat nasional.

Bahasa Anggodo telah membuktikan bahwa bahasa Indonesia dan bahasa daerah hidup bersama--bahkan hidup lestari--tanpa dikotomi. Dikotomi politis antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah terbukti tidak cocok dengan kenyataan hidup berbahasa di masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan perancangan kembali apa yang disebut dengan bahasa Indonesia. Secara politis, bahasa Indonesia perlu dirancang dengan menampung adanya fakta ketidakseragaman praktik berbahasa daerah/lokal. Rancangan bahasa Indonesia ini dapat mengadopsi rancangan Batt untuk bahasa Inggris di India: "*Planning English, Planning Inequality*".

Ketika bahasa Indonesia dirancang kembali untuk mewadahi keanekaragaman bentuk bahasa—apa yang selama ini disebut sebagai bahasa nasional dan bahasa lokal serta bahasa formal dan bahasa informal ataupun sebutan lainnya—demi keutuhan bangsa Indonesia, wadah bahasa Indonesia itu akan menjadi wahana kebangsaan yang sangat kuat. Misalnya, wadah itu berfungsi sebagai tempat pelestarian bahasa ibu. Karena bahasa ibu atau bahasa daerah tetap hidup lestari dalam wadah bahasa itu, kalangan masyarakat daerah tidak akan terprovokasi dengan isu kepunahan bahasa ibu. Isu kepunahan bahasa yang sekarang tersebar di Indonesia telah membangkitkan semangat primordialisme dan isu ini menuntut ditangani segera dengan menata kembali situasi kebahasaan Indonesia.

Perjuangan *bahasa ibu* yang sekarang digelorkan oleh unsur masyarakat dan pemerintah daerah belum dikendalikan untuk mencegah retaknya perekat kebangsaan Indonesia, yaitu bahasa Indonesia yang telah dinyatakan dalam Sumpah Pemuda (butir ke-3) dan Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 36).

Sikap pemerintah daerah tampak sangat berlebihan ketika dengan dalih pelestarian bahasa ibu, bahasa daerah wajib digunakan dalam forum resmi pemerintahan. Sikap berlebihan itu tidak hanya ditunjukkan oleh pemerintah di daerah berbahasa Jawa, seperti di Kabupaten Karanganyar, tetapi sikap primordialisme itu telah diikuti di banyak daerah lain, termasuk Jawa Barat.

Makna hermeneutik dari teks bahasa Anggodo ialah bahwa perilaku bahasa Anggodo dan kawan-kawan bicaranya merupakan sebuah refleksi perilaku bahasa masyarakat. Masyarakat telah berubah; tidak hanya berperilaku bahasa lokal, tetapi sekaligus berbahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dan bahasa daerah tidak dapat saling terpisah. Dikotomi bahasa itu terbukti dari bahasa Anggodo telah tidak mencerminkan dinamika masyarakat Indonesia tersebut. Karena bahasa merupakan cermin perilaku masyarakat, kebijakan politik bahasa dituntut beradaptasi dengan merancang bahasa Indonesia sebagai bahasa bercirikan lokalitas Indonesia.

5. Penutup

Bahasa Anggodo ditemukan telah menciptakan sebuah konteks sosio-linguistik yang di dalamnya masyarakat Indonesia tampak berperilaku membentuk semacam mozaik bahasa: bahasa Indonesia lokal. Dalam konteks itu Anggodo telah berhasil memproduksi teks bahasa Indonesia Jawa (Jawa Timur). Teks bahasa Indonesia lokal seperti itu ternyata diproduksi juga di daerah-daerah lain di Indonesia. Mozaik bahasa Indonesia lokal tersebut diisi penuh warna bahasa, baik dengan bahasa Indonesia maupun dengan bahasa-bahasa daerah (Jawa, Papua, Sunda, dan lain-lain). Bahasa Indonesia lokal itulah bentuk atau wujud “bahasa persatuan” yang dalam khazanah linguistik dapat disebut “bahasa hibrida” (*hybrid*

language’).

Ditemukan pula bahwa kebijakan kebahasaan belum menerima fakta bahasa Anggodo karena bahasa Indonesia secara politis masih terpisah dari bahasa daerah. Bahasa Indonesia belum dikonstruksi atau dimaknai bercirikan lokalitas. Oleh sebab itu, teks bahasa Anggodo pun ambigu atau rancu untuk dimasukkan ke dalam wacana bahasa Indonesia. Kerancuan bahasa seperti itu juga sering dimaknai sebagai kerusakan bahasa daerah yang mengancam eksistensi bahasa ibu. Anggapan keliru adanya ancaman kepunahan terhadap bahasa ibu telah memicu kebangkitan primordialisme pada masyarakat daerah. Padahal, fenomena bahasa Indonesia lokal seperti pada kasus Anggodo merupakan sebuah bukti kebangkitan bangsa untuk bersatu melalui perilaku berbahasa di masyarakat.

Sebuah rekomendasi dari diskusi makalah ini ialah perlunya menghapus dikotomi politis antara bahasa Indonesia (bahasa nasional) dan bahasa Jawa, bahasa Sunda serta bahasa-bahasa daerah lain. Secara linguistik, perbedaan bahasa itu tidak berbentuk semacam diskret, melainkan sebuah kontinum. Bahasa nasional dan bahasa lokal (daerah) semuanya perlu diberi satu wadah yang berlabel bahasa Indonesia. Rekomendasi berikutnya ialah perlunya menciptakan kemauan politik untuk mengakui fenomena berbahasa Indonesia lokal sebagai fakta berbahasa ibu di masyarakat. Kemauan politik kebahasaan ini perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah dalam penyusunan kebijakan bahasa dan kebijakan pendidikan berbasis bahasa ibu.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, Hasan dan Dendy Sugono, 2000. *Politik Bahasa*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Bhatt, Rakesh M. 2005. "Expert Discourses, Local Practices, and Hybridity: The Case of Indian Englishes". artikel dalam *Reclaiming The Local in Language Policy and Practice* (ed. A Suresh Canagarajah). London: Lawrence Erlbaum Associates.
- Mahsun. 2009. "Beberapa Persoalan dalam Upaya Menjadikan Bahasa Ibu sebagai Bahasa Pengantar Pendidikan di Indonesia". Makalah Seminar Internasional Bahasa dan Pendidikan Anak Bangsa di Bandung pada tanggal 26 Mei.
- Maryanto. 2008. "Bahasa Indonesia Lokal dan Bahasa Lintas-Kurikulum: Pendidikan untuk Semua". Makalah pada Seminar Nasional Bahasa dan Sastra Indonesia XVI Himpunan Pembina Bahasa Indonesia di Yogyakarta, 16—18 Mei 2008.
- , 2010. "Bahasa Ibu Mau ke Mana?". *Koran Tempo*, 21 Februari 2010.
- Nababan, P.W.J., 1993. *Sosiolinguistik Suatu Pengantar*. Jakarta: Gramedia.
- Pattanayak, D.P. 1981. *Multilingualism and Mother-Tongue Education*. Delhi, Oxford University Press.
- Widodo, Supriyanto. 2006. "Mengenal 'Bahasa Indonesia Dialek Jayapura". Artikel majalah *Kibas Cendrawasih* Volume 2, Nomor 2, Oktober 2006.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.